

## **Perbandingan Persepsi Akuntan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi di Sektor Publik dan Privat**

<sup>1\*</sup>Rahmayani, <sup>2</sup>Marwah Yusuf

<sup>1\*,2</sup>, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Bongaya Makassar, Indonesia

*Corresponding author email: rahmayani123@gmail.com*

### **Article Info**

#### **Article history:**

Received Month 11, 2025

Approved Month 12, 2025

### **ABSTRACT**

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persepsi akuntan terhadap akuntabilitas dan transparansi di sektor publik dan privat, dengan fokus pada faktor-faktor yang memengaruhi praktik akuntansi dan pelaporan keuangan di kedua sektor tersebut. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode wawancara mendalam kepada akuntan yang bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta, serta analisis dokumen terkait laporan keuangan dan kebijakan akuntansi. Hasil penelitian menunjukkan adanya perbedaan signifikan dalam cara akuntan menilai akuntabilitas dan transparansi antara kedua sektor. Akuntan di sektor publik cenderung menekankan akuntabilitas vertikal dan kepatuhan terhadap regulasi serta tuntutan masyarakat sebagai faktor utama dalam pelaporan keuangan, sedangkan akuntan di sektor privat lebih menekankan transparansi sebagai alat strategis untuk membangun kepercayaan investor dan mendukung pengambilan keputusan manajerial. Selain itu, temuan penelitian mengungkapkan bahwa sektor publik menghadapi kendala birokrasi dan keterbatasan sumber daya yang memengaruhi kualitas informasi keuangan, sementara sektor privat dihadapkan pada tekanan pasar dan kebutuhan untuk menjaga citra perusahaan. Perbedaan persepsi ini mencerminkan konteks operasional dan tujuan masing-masing sektor, sehingga praktik akuntansi dan pelaporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan stakeholder yang berbeda. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pemahaman literatur akuntansi, khususnya mengenai dinamika akuntabilitas dan transparansi dalam konteks sektor publik dan privat, serta dapat menjadi dasar pengembangan kebijakan dan praktik pelaporan keuangan yang lebih efektif dan adaptif..

**Keywords:** Akuntabilitas, Transparansi, Persepsi Akuntan

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



**How to cite:** Example: Rahmayani, R, Yusuf, M, (2025). Perbandingan Persepsi Akuntan terhadap Akuntabilitas dan Transparansi di Sektor Publik dan Privat. *Indonesian Journal of Educational Research and Evaluation Global*, 1(1), 43–51. <https://doi.org/10.55681/ijereg.v1i1.62>

## **PENDAHULUAN**

Akuntabilitas dan transparansi merupakan prinsip fundamental dalam praktik akuntansi yang mencerminkan penerapan tata kelola organisasi yang baik dan profesional. Akuntabilitas menekankan pertanggungjawaban atas penggunaan sumber daya organisasi kepada berbagai

stakeholder, termasuk masyarakat, pemerintah, investor, dan kreditor, sehingga setiap tindakan dan keputusan finansial harus dapat dipertanggungjawabkan secara etis, hukum, dan profesional. Sementara itu, transparansi menekankan keterbukaan, aksesibilitas, dan kelengkapan informasi yang disampaikan kepada pihak luar, sehingga memungkinkan stakeholder untuk memahami kondisi keuangan dan pengambilan keputusan organisasi secara objektif (Mardiasmo, 2009; Halim & Kusufi, 2014). Di sektor publik, prinsip-prinsip ini memiliki peran yang sangat penting karena anggaran organisasi bersumber dari dana publik; oleh karena itu, masyarakat memiliki hak untuk menerima laporan keuangan yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan. Pelaporan yang transparan juga membantu mencegah praktik penyalahgunaan anggaran dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah dan lembaga publik. Sebaliknya, di sektor privat, praktik akuntansi lebih berorientasi pada pemenuhan kebutuhan investor, kreditor, dan pihak eksternal lainnya yang berkepentingan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Dalam konteks ini, akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menjadi kewajiban hukum, tetapi juga strategi untuk membangun reputasi perusahaan, menarik investasi, dan memastikan kesinambungan bisnis jangka panjang. Dengan demikian, meskipun prinsip akuntabilitas dan transparansi berlaku di kedua sektor, fokus, motivasi, dan bentuk penerapannya menyesuaikan dengan tujuan dan karakteristik masing-masing organisasi.

Sektor publik dan sektor privat memiliki karakteristik yang mendasar berbeda, yang pada gilirannya memengaruhi praktik akuntabilitas dan transparansi. Sektor publik berfokus pada penyediaan layanan kepada masyarakat tanpa motif keuntungan finansial, dan operasionalnya sangat dipengaruhi oleh regulasi ketat serta pengawasan publik yang intensif (Mardiasmo, 2009). Keberhasilan sektor ini diukur bukan hanya dari efisiensi pengelolaan anggaran, tetapi juga dari sejauh mana layanan publik dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan memenuhi standar pertanggungjawaban hukum. Sebaliknya, sektor privat berorientasi pada profitabilitas, pertumbuhan perusahaan, dan nilai tambah bagi pemegang saham. Dalam konteks ini, akuntabilitas dan transparansi tidak hanya menjadi kewajiban administratif, tetapi juga berfungsi sebagai alat strategis untuk mempertahankan kepercayaan investor, menarik modal, dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Perbedaan mendasar dalam tujuan dan orientasi ini menghasilkan perbedaan persepsi di kalangan akuntan terkait bagaimana prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam praktik sehari-hari di masing-masing sektor.

Akuntabilitas tidak hanya terbatas pada pelaporan angka atau data keuangan, tetapi juga mencakup tanggung jawab moral, etis, dan hukum atas penggunaan sumber daya organisasi. Prinsip ini menekankan bahwa setiap keputusan pengelolaan dana dan tindakan manajerial harus dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak-pihak yang berkepentingan, sehingga mencerminkan transparansi, integritas, dan tata kelola yang baik. Dalam sektor publik, akuntabilitas berarti kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban kepada masyarakat dan lembaga legislatif sebagai wakil publik terkait penggunaan anggaran negara atau daerah (Sari & Muslim, 2023), termasuk aspek legal, etis, dan sosial, di mana setiap keputusan harus dapat diaudit dan dikomunikasikan secara terbuka untuk membangun kepercayaan publik. Sementara itu, di sektor privat, akuntabilitas lebih diarahkan pada kewajiban melaporkan kondisi keuangan perusahaan secara jujur, akurat, dan tepat waktu kepada investor, kreditor, dan pihak eksternal lain yang berkepentingan. Akuntabilitas di sektor privat berfungsi sebagai instrumen strategis untuk membangun kepercayaan pasar, mengurangi risiko reputasi, dan mendukung kesinambungan bisnis, sehingga orientasinya bersifat profit-oriented dan disesuaikan dengan tujuan organisasi serta karakteristik stakeholder masing-masing. Transparansi merujuk pada keterbukaan, aksesibilitas, dan kelengkapan informasi yang disajikan dalam laporan keuangan, yang memungkinkan stakeholder membuat penilaian dan keputusan yang tepat. Di sektor publik, transparansi berperan penting dalam mencegah praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme, serta meningkatkan akuntabilitas pejabat publik sekaligus membangun kepercayaan

masyarakat terhadap pemerintah (Loso Judijanto dkk, 2024). Informasi yang terbuka dan dapat diakses publik menjadi mekanisme kontrol sosial yang efektif dan mendukung tata kelola pemerintahan yang baik. Sebaliknya, di sektor privat, transparansi dijalankan sebagai strategi untuk memperkuat kredibilitas perusahaan di mata investor dan pihak eksternal, sehingga dapat memengaruhi keputusan investasi, reputasi perusahaan, dan dukungan pasar. Dengan demikian, meskipun prinsip transparansi sama-sama penting di kedua sektor, motivasi dan bentuk implementasinya berbeda sesuai konteks dan tujuan organisasi.

Akuntan memegang peran krusial dalam memastikan penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di berbagai jenis organisasi, baik publik maupun privat. Tugas utama mereka meliputi penyusunan laporan keuangan yang objektif, akurat, dan tepat waktu sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku, sehingga informasi yang disajikan dapat dipercaya dan digunakan secara efektif oleh seluruh stakeholder. Dalam sektor publik, akuntan harus menyesuaikan laporan keuangan dengan standar akuntansi sektor publik, yang menekankan pertanggungjawaban terhadap masyarakat dan pemerintah sebagai pemangku kepentingan utama (Putri, 2024). Laporan keuangan publik tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian internal, tetapi juga sebagai sarana komunikasi yang dapat dipertanggungjawabkan secara sosial, hukum, dan etis, sehingga mendukung tata kelola pemerintahan yang baik dan membangun kepercayaan publik. Sebaliknya, di sektor privat, akuntan berfokus pada penyusunan laporan keuangan yang relevan bagi pengambilan keputusan manajerial serta kebutuhan investor dan kreditor, di mana tingkat transparansi dan keakuratan informasi dapat memengaruhi keputusan investasi, reputasi perusahaan, dan keberlanjutan bisnis jangka panjang. Perbedaan orientasi ini menunjukkan bahwa, meskipun peran akuntan sama pentingnya di kedua sektor, tujuan, penggunaan, dan fokus laporan keuangan sangat dipengaruhi oleh konteks operasional, karakteristik stakeholder, dan strategi organisasi masing-masing, sehingga praktik akuntansi harus disesuaikan untuk memenuhi kebutuhan spesifik dari setiap lingkungan organisasi.

Persepsi akuntan terhadap akuntabilitas dan transparansi cenderung berbeda antara sektor publik dan privat karena adanya variasi konteks, tujuan, dan tuntutan stakeholder yang dilayani. Di sektor publik, akuntan sering memandang akuntabilitas sebagai kewajiban moral dan hukum untuk memastikan bahwa setiap pengeluaran dan penggunaan sumber daya publik dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan lembaga pengawas. Sementara di sektor privat, transparansi dipahami lebih sebagai strategi untuk membangun kepercayaan investor, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung pengambilan keputusan manajerial yang efektif. Perbedaan persepsi ini memunculkan pertanyaan penelitian yang signifikan, yakni bagaimana akuntan menafsirkan dan menerapkan kedua konsep tersebut dalam praktik sehari-hari di masing-masing sektor, serta bagaimana persepsi ini memengaruhi kualitas laporan keuangan, pengambilan keputusan, dan interaksi dengan berbagai stakeholder. Dengan memahami perbedaan ini, penelitian dapat memberikan wawasan tentang faktor-faktor yang mendorong atau menghambat praktik akuntansi yang baik di berbagai konteks organisasi.

Beberapa penelitian sebelumnya telah membahas akuntabilitas dan transparansi secara umum di sektor publik maupun privat (Sari & Muslim, 2023; Loso Judijanto dkk, 2024). Namun, penelitian komparatif yang secara langsung menilai persepsi akuntan antara kedua sektor di Indonesia masih terbatas. Padahal konteks lokal dan karakteristik regulasi nasional dapat memengaruhi cara akuntan menilai dan menerapkan akuntabilitas serta transparansi.

Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan persepsi akuntan terhadap akuntabilitas dan transparansi di sektor publik dan privat. Dengan mengetahui perbedaan persepsi ini, penelitian diharapkan dapat memberikan wawasan bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan mengenai praktik akuntansi yang efektif dan sesuai kebutuhan stakeholder di masing-masing sektor. Penelitian ini memberikan kontribusi akademik melalui pemahaman komparatif

persepsi akuntan di sektor publik dan privat. Secara praktis, hasil penelitian diharapkan dapat membantu lembaga pendidikan menyusun kurikulum akuntansi yang relevan, serta memberikan panduan bagi organisasi dalam meningkatkan praktik akuntabilitas dan transparansi. Selain itu, penelitian ini juga dapat menjadi dasar bagi pengembangan kebijakan akuntansi yang lebih adaptif terhadap tuntutan masyarakat dan pasar.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif komparatif. Pendekatan kualitatif dipilih karena bertujuan untuk menggali persepsi akuntan terhadap akuntabilitas dan transparansi di sektor publik dan privat secara mendalam, bukan sekadar mengukur secara kuantitatif (Sugiyono, 2017). Penelitian deskriptif komparatif memungkinkan peneliti untuk membandingkan persepsi antara dua kelompok responden, yaitu akuntan yang bekerja di instansi pemerintah dan perusahaan swasta, sehingga dapat diketahui perbedaan sikap, pandangan, dan praktik terkait akuntabilitas dan transparansi.

Populasi penelitian ini adalah seluruh akuntan yang bekerja di sektor publik dan sektor privat di wilayah Indonesia. Sampel dipilih menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan responden berdasarkan kriteria tertentu yang relevan dengan tujuan penelitian, seperti pengalaman kerja dan keterlibatan dalam penyusunan laporan keuangan (Moleong, 2017). Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dan studi dokumentasi laporan keuangan serta kebijakan akuntansi masing-masing organisasi. Wawancara bersifat semi-terstruktur sehingga peneliti dapat menggali informasi lebih luas sesuai konteks persepsi responden.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan teknik analisis tematik, yaitu mengelompokkan informasi berdasarkan tema-tema utama seperti akuntabilitas, transparansi, faktor pengaruh, dan perbedaan persepsi antar sektor (Creswell, 2014). Hasil analisis kemudian disajikan secara naratif dan komparatif untuk menunjukkan perbedaan persepsi akuntan di sektor publik dan privat. Selain itu, validitas data dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, sehingga temuan penelitian dapat dipercaya dan menggambarkan kondisi nyata.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi akuntan terkait akuntabilitas dan transparansi dalam praktik akuntansi di sektor publik dan privat. Untuk mencapai tujuan tersebut, digunakan metode wawancara mendalam dengan 12 akuntan profesional yang dipilih secara purposive, terdiri dari 6 akuntan di sektor publik meliputi pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan dan 6 akuntan di sektor privat, yang berasal dari perusahaan manufaktur dan jasa. Pendekatan wawancara ini memungkinkan peneliti memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai pengalaman, pandangan, dan praktik akuntansi yang dijalankan oleh masing-masing responden. Analisis difokuskan pada perbedaan perspektif mengenai pentingnya akuntabilitas, tingkat keterbukaan informasi, serta faktor-faktor yang mendorong maupun menghambat penerapan prinsip akuntansi di kedua sektor tersebut. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya menyoroti aspek teoritis akuntabilitas dan transparansi, tetapi juga menekankan praktik nyata yang dijalankan oleh akuntan di konteks profesional.

Hasil wawancara menunjukkan bahwa mayoritas akuntan sektor publik menempatkan akuntabilitas sebagai prioritas utama dalam pelaporan keuangan. Hal ini disebabkan oleh keterkaitan langsung antara akuntabilitas dengan kepercayaan publik serta pengawasan dari lembaga legislatif dan pengawas. Seorang responden dari instansi pemerintah menyatakan, “Kami selalu menekankan akuntabilitas karena laporan kami harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat luas dan legislatif.” Pernyataan ini menegaskan bahwa orientasi akuntan publik lebih kepada pemenuhan tanggung jawab sosial dan etika

profesional, di mana setiap laporan keuangan dianggap sebagai wujud pertanggungjawaban kepada stakeholder publik. Temuan ini juga menunjukkan bahwa aspek regulasi dan kepatuhan hukum menjadi pendorong kuat dalam praktik akuntansi sektor publik, sehingga transparansi tidak hanya menjadi tujuan internal, tetapi juga tuntutan eksternal dari masyarakat dan pengawas.

Di sisi lain, akuntan sektor privat cenderung menekankan transparansi sebagai strategi utama untuk menarik investor, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung pengambilan keputusan bisnis. Seorang akuntan dari perusahaan swasta mengungkapkan, “Transparansi bukan hanya sekadar memenuhi standar, tetapi juga strategi untuk mempertahankan dan menarik pihak eksternal seperti investor dan kreditor.” Hal ini menunjukkan bahwa orientasi akuntan privat lebih bersifat pasar atau profit-oriented, di mana keterbukaan informasi dipandang sebagai alat untuk meningkatkan kepercayaan pihak eksternal dan memperkuat posisi kompetitif perusahaan. Perbedaan orientasi ini menekankan bahwa akuntabilitas di sektor privat sering kali dikaitkan dengan efektivitas pengelolaan sumber daya dan hubungan dengan stakeholder bisnis, berbeda dengan fokus sosial dan regulatif yang lebih dominan di sektor publik.

Selain perbedaan orientasi, penelitian ini menemukan adanya hambatan spesifik dalam penerapan akuntabilitas dan transparansi di kedua sektor. Beberapa responden sektor publik mengungkapkan bahwa keterbatasan teknologi informasi dan sumber daya manusia menjadi kendala utama dalam menyajikan laporan keuangan yang sepenuhnya transparan dan akurat. Sementara itu, responden sektor privat menyebutkan tekanan terhadap target laba dan ekspektasi pasar seringkali membatasi ruang untuk menyusun laporan yang sepenuhnya terbuka. Kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun prinsip akuntabilitas dan transparansi sama-sama dihargai, faktor internal dan eksternal yang berbeda di setiap sektor mempengaruhi cara akuntan menjalankan praktik pelaporan keuangan. Temuan ini menegaskan perlunya strategi khusus dan kebijakan adaptif untuk mengatasi hambatan tersebut, baik dari sisi regulasi, teknologi, maupun manajemen organisasi.

Sejalan dengan temuan dari wawancara, penelitian Pratiwi & Iliyin (2023) menegaskan bahwa akuntabilitas dan transparansi memiliki peran sentral dalam pengelolaan keuangan, termasuk dalam konteks organisasi nirlaba seperti yayasan. Meskipun prinsip-prinsip ini dianggap penting, penelitian tersebut juga menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi dalam operasional sehari-hari masih menghadapi tantangan signifikan, seperti keterbatasan sumber daya manusia, minimnya sistem pelaporan yang terstandarisasi, dan kurangnya pemahaman mengenai praktik akuntansi yang baik. Temuan ini memperkuat kesimpulan bahwa persepsi dan tingkat penerapan kedua konsep tersebut tidak bersifat universal, melainkan sangat bergantung pada konteks organisasi, karakteristik stakeholder, dan kapasitas internal institusi. Dengan kata lain, keberhasilan implementasi akuntabilitas dan transparansi membutuhkan adaptasi terhadap kondisi spesifik masing-masing organisasi.

Lebih lanjut, Juwainah & Warsoyo (2023) menekankan bahwa berbagai faktor memengaruhi tingkat akuntabilitas dan transparansi dalam organisasi, termasuk partisipasi aktif publik, mekanisme pengawasan yang efektif, serta komitmen internal dari manajemen dan staf. Penelitian mereka menemukan bahwa partisipasi publik yang tinggi dan pengawasan yang ketat berdampak positif terhadap kinerja organisasi publik, baik dari segi efisiensi penggunaan anggaran maupun akurasi pelaporan keuangan. Temuan ini mendukung pandangan yang diungkapkan oleh akuntan sektor publik dalam wawancara, yaitu bahwa stakeholder eksternal seperti masyarakat dan lembaga pengawas—menjadi pendorong utama praktik akuntansi yang baik. Dengan demikian, integrasi antara prinsip akuntabilitas, transparansi, dan keterlibatan publik menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas pelaporan serta membangun kepercayaan masyarakat terhadap institusi publik.

Dalam konteks pendidikan dan persepsi masyarakat, Putra & Irawan (2023) menekankan bahwa transparansi dan akuntabilitas merupakan konsep yang sangat penting untuk membangun kepercayaan antara organisasi dan stakeholder. Kejelasan informasi dan komunikasi yang jujur tidak hanya memengaruhi kepercayaan masyarakat, tetapi juga membentuk reputasi institusi secara keseluruhan. Dalam praktik akuntansi, hal ini relevan dengan persepsi akuntan yang meyakini bahwa keterbukaan informasi menjadi dasar bagi hubungan profesional yang efektif, baik antarinternal organisasi maupun dengan pihak eksternal seperti investor, kreditor, dan publik. Temuan ini menunjukkan bahwa akuntan melihat transparansi bukan sekadar kewajiban formal, tetapi sebagai sarana strategis untuk menciptakan kredibilitas dan meningkatkan partisipasi stakeholder dalam mendukung tujuan organisasi. Dengan demikian, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas secara konsisten dapat menjadi alat untuk memperkuat hubungan profesional dan membangun kepercayaan jangka panjang yang berkelanjutan.

Selain itu, penelitian mengenai transparansi dan akuntabilitas di lingkungan sekolah oleh Murti & Kusumaningtias (2023) menunjukkan bahwa meskipun kedua konsep tersebut dianggap penting, keberadaannya tidak selalu berdampak langsung pada peningkatan kinerja organisasi. Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor manajerial, termasuk kurangnya tanggung jawab pimpinan, lemahnya sistem pengawasan internal, dan kurangnya konsistensi dalam penerapan prosedur tata kelola. Temuan ini sejalan dengan persepsi akuntan di sektor privat, di mana tekanan terhadap target profitabilitas dan pencapaian kinerja finansial sering kali menempatkan hasil ekonomi sebagai prioritas utama, sementara keterbukaan informasi dan penerapan transparansi menjadi pilihan tambahan yang bersifat opsional, bukan kebutuhan mendesak. Dengan kata lain, akuntabilitas dan transparansi tidak dapat berjalan efektif tanpa adanya dukungan manajerial yang kuat, sistem kontrol internal yang handal, serta komitmen pimpinan untuk memastikan praktik-praktik tersebut diterapkan secara konsisten. Penelitian ini mempertegas bahwa tanpa penguatan internal melalui regulasi, mekanisme pengawasan, dan kepemimpinan yang proaktif, penerapan prinsip transparansi dan akuntabilitas cenderung bersifat formalitas semata dan tidak sepenuhnya mampu mencapai tujuan utama, yaitu meningkatkan kepercayaan stakeholder dan kualitas pengelolaan organisasi.

Penelitian Turi & Muharram (2023) menunjukkan bahwa transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi memiliki korelasi positif dengan tingkat kepercayaan anggota koperasi. Hal ini mirip dengan pernyataan akuntan sektor privat yang menilai bahwa transparansi merupakan alat utama untuk membangun kepercayaan investor, menjaga reputasi perusahaan, serta memperkuat loyalitas stakeholder. Temuan ini menegaskan bahwa persepsi terhadap transparansi sering kali dipengaruhi oleh kebutuhan pasar modal atau kebutuhan pihak luar yang menuntut informasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan. Dengan kata lain, keberhasilan transparansi tidak hanya tergantung pada penyediaan data, tetapi juga pada konteks penggunaan informasi tersebut, yang berfokus pada penguatan kepercayaan pihak-pihak yang memiliki kepentingan ekonomi langsung terhadap organisasi.

Selain itu, analisis Oktarina dkk. (2023) menyoroti bahwa transparansi dan akuntabilitas dalam sistem penganggaran memiliki peran strategis dalam memperkuat kinerja organisasi layanan publik. Penerapan prinsip-prinsip ini memungkinkan pengelolaan anggaran yang lebih efisien, terukur, dan dapat dipertanggungjawabkan secara menyeluruh kepada masyarakat serta lembaga pengawas. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan wawancara akuntan publik, yang menekankan bahwa keterbukaan informasi terkait anggaran dan pelaporan keuangan merupakan fondasi utama tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, dan terpercaya. Transparansi dalam penganggaran tidak hanya meningkatkan kepercayaan publik terhadap pemerintah, tetapi juga mendorong optimalisasi penggunaan anggaran, meminimalkan risiko penyalahgunaan dana, serta meningkatkan kualitas layanan publik. Temuan ini menunjukkan

bahwa penerapan prinsip transparansi di sektor publik bersifat kompleks dan memerlukan integrasi yang efektif antara regulasi formal, sistem teknologi informasi, dan partisipasi masyarakat untuk menghasilkan laporan yang akurat dan dapat diakses oleh stakeholder secara luas.

Penelitian Juwainah & Warsoyo (2023) menegaskan bahwa keterlibatan partisipasi publik merupakan faktor penting untuk memperkuat akuntabilitas dan transparansi organisasi, khususnya di sektor publik. Partisipasi publik, yang meliputi pengawasan penggunaan anggaran, evaluasi kinerja, dan akses terhadap informasi keuangan, dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan sekaligus mendorong akuntan publik untuk menerapkan standar profesional yang lebih tinggi. Temuan ini relevan dengan respons akuntan publik dalam penelitian ini, yang menekankan perlunya akses informasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan, sehingga akuntabilitas tidak hanya bersifat internal, tetapi juga melibatkan pihak eksternal sebagai pengawas dan evaluator. Dengan demikian, integrasi antara transparansi, akuntabilitas, dan partisipasi publik menjadi kunci keberhasilan tata kelola sektor publik, di mana pengawasan masyarakat dan mekanisme formal saling melengkapi untuk memastikan penggunaan sumber daya publik secara efektif, efisien, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Di sisi lain, sejumlah kajian dalam edisi Jurnal Akuntansi Kompetif (2023) menunjukkan bahwa inovasi dalam praktik akuntansi, khususnya pemanfaatan teknologi digital, dapat memperkuat penerapan prinsip akuntabilitas dan transparansi di era modern. Penerapan sistem informasi keuangan berbasis digital memungkinkan penyajian laporan secara cepat, akurat, dan real-time, sehingga mempermudah pengawasan dan pengambilan keputusan bagi seluruh pemangku kepentingan. Temuan ini sejalan dengan hasil wawancara yang menunjukkan bahwa keterbatasan teknologi menjadi salah satu kendala utama di sektor publik dalam menyajikan informasi yang akurat dan tepat waktu. Dengan memanfaatkan teknologi digital, organisasi dapat meningkatkan keandalan data, mempermudah akses stakeholder terhadap informasi, serta meminimalkan potensi kesalahan atau manipulasi data. Dengan demikian, integrasi teknologi informasi tidak hanya meningkatkan efisiensi operasional, tetapi juga memperkuat transparansi dan akuntabilitas, sehingga prinsip-prinsip tata kelola yang baik dapat diterapkan secara lebih efektif di berbagai jenis organisasi.

Secara keseluruhan, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa akuntabilitas dan transparansi dianggap sebagai konsep yang penting oleh akuntan di kedua sektor, namun perbedaan konteks operasional, tekanan eksternal, tujuan organisasi, serta dukungan manajerial menciptakan variasi dalam persepsi dan praktik penerapannya. Faktor internal, seperti komitmen pimpinan, kompetensi teknis staf, serta sistem pengawasan yang efektif, memengaruhi kemampuan organisasi untuk menyusun laporan yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan. Sementara itu, faktor eksternal, seperti regulasi pemerintah, partisipasi publik, dan kebutuhan pasar atau investor, turut menentukan seberapa jauh prinsip akuntabilitas dan transparansi diterapkan dalam praktik nyata. Temuan ini sejalan dengan berbagai studi terdahulu yang menekankan pentingnya interaksi antara faktor internal dan eksternal dalam menentukan keberhasilan implementasi akuntabilitas dan transparansi, baik di sektor publik maupun privat, serta menegaskan bahwa keberhasilan tata kelola organisasi modern bergantung pada kemampuan untuk menyeimbangkan tuntutan internal dan eksternal secara simultan.

## KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa persepsi akuntan terhadap akuntabilitas dan transparansi berbeda antara sektor publik dan privat. Akuntan di sektor publik

menempatkan akuntabilitas sebagai prioritas utama karena keterkaitan langsung dengan kepercayaan masyarakat dan pengawasan legislatif, sementara transparansi menjadi sarana untuk meningkatkan kualitas layanan dan pengelolaan anggaran. Sebaliknya, akuntan di sektor privat lebih menekankan transparansi sebagai strategi untuk membangun kepercayaan investor, menjaga reputasi perusahaan, dan mendukung pengambilan keputusan ekonomi. Perbedaan konteks operasi, tujuan organisasi, tekanan eksternal, dan faktor manajerial memengaruhi cara akuntan memahami dan menerapkan kedua konsep tersebut.

Penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan akuntabilitas dan transparansi tidak hanya dipengaruhi oleh regulasi dan standar akuntansi, tetapi juga oleh faktor internal seperti dukungan manajemen, sistem pengawasan, dan kemampuan teknis, serta faktor eksternal seperti partisipasi stakeholder dan kebutuhan pasar. Oleh karena itu, meskipun kedua konsep dianggap penting oleh akuntan di kedua sektor, strategi implementasi perlu disesuaikan dengan karakteristik dan tujuan organisasi. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi akademik dalam memahami perbedaan persepsi profesi akuntansi, sekaligus menjadi referensi bagi lembaga pendidikan, pembuat kebijakan, dan praktisi dalam merancang praktik akuntansi yang lebih efektif, akuntabel, dan transparan di sektor publik maupun privat.

## DAFTAR PUSTAKA

- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Thousand Oaks, CA: Sage.
- Halim, A., & Kusufi, M. (2014). *Akuntansi sektor publik: Konsep dan praktik*. Jakarta: Salemba Empat.
- Juwainah, & Warsoyo, R. P. (2023). *Faktor-faktor yang mempengaruhi akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi publik terhadap kinerja organisasi layanan publik. Sammajiva: Jurnal Penelitian Bisnis dan Manajemen*, 1(4), 65–81.
- Loso Judijanto, E., Sudarmanto, E., & Triantoro, A. (2024). *Transparansi dan akuntabilitas dalam laporan keuangan sektor publik. Jurnal Bisnis dan Manajemen*, 3(2), 223–233.
- Mardiasmo. (2009). *Akuntansi sektor publik*. Yogyakarta: Andi.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Revisi edisi ke-15). Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Murti, A. C., & Kusumaningtiyas, R. (2023). *Pengaruh transparansi, akuntabilitas, dan responsibilitas pengelolaan keuangan sekolah terhadap kinerja guru. Jurnal Riset Akuntansi*, 3(1), 2958.
- Oktarina, F. S., Saftiana, Y., & Azwardi, A. (2023). *Transparansi, pengawasan, akuntabilitas, redesain sistem penganggaran dan kinerja badan layanan umum. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi*, 7(4), 3063–3082.
- Pratiwi, B. Y., & Iliyini, F. A. (2023). *Akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan pada yayasan panti asuhan Attafakur. Jurnal Akuntansi Terapan dan Bisnis*, 3(2), 147–153.
- Putri, N. (2024). *Analisis implementasi akuntansi sektor publik dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan pemerintah daerah Lampung. Jurnal Anggaran*, 1(2), 01–04.
- Sari, R., & Muslim, M. (2023). *Accountability and transparency in public sector accounting: A systematic review. Amkop Management Accounting Review*, 3(2), 90–106.
- Sugiyono. (2017). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Turi, L. O., & Muharram, A. I. (2023). *Pengaruh transparansi dan akuntabilitas laporan keuangan koperasi terhadap tingkat kepercayaan anggota koperasi. Jurnal Economina*, 2(12), 3787–3797.



